

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua secara parsial. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk yang bekerja di sektor informal akibat tenaga kerja di Provinsi Papua didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah. Sedangkan, pengangguran di Provinsi Papua didominasi oleh pengangguran selektif berpendidikan tinggi yang pemilih dalam mencari pekerjaan. (tambah kebijakan pemerintah). Pemerintah Provinsi Papua berupaya mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor ekonomi lokal, peningkatan investasi, serta fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan perbaikan infrastruktur juga diimplementasikan untuk mendukung usaha kecil dan meningkatkan hubungan ke pasar kerja.
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua secara parsial. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keberhasilan dari pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Tingginya kualitas seorang individu dapat meningkatkan standar hidup mereka. Kondisi ini akan meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan. Pemerintah Provinsi Papua telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penyaluran bantuan sosial, serta program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran,

3. Variabel Laju Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua secara parsial. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak signifikan dari variabel ini terjadi karena peningkatan PDRB cenderung kecil dan bahkan beberapa kali mengalami penurunan. Selain itu, terdapat ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi akibat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua tidak disertai dengan pemerataan sehingga tidak semua masyarakat dapat merasakan peningkatan pendapatan. Pemerintah Provinsi Papua telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan PDRB dan laju pertumbuhannya dengan fokus pada penguatan fiskal daerah melalui penerbitan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) untuk alokasi dana otonomi khusus, peningkatan investasi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, perbaikan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil yang ditemukan peneliti, terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu:

V.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi peneliti lain yang berniat untuk meneliti topik serupa, disarankan untuk menambahkan variabel bebas lainnya, atau menggunakan variabel bebas lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini guna dapat mengetahui komponen lain yang dapat menunjukkan adanya pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Papua.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat memperpanjang periode penelitian dan dengan memfokuskan pada cakupan objek penelitian yang lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan terperinci.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan serta memperluas cakupan referensi dengan mengutamakan literatur terkini dan sumber terpercaya yang tervalidasi secara akademis.

V.2.2 Saran Praktis

1. Diharapkan pemerintah Provinsi Papua untuk dapat membuat lapangan pekerjaan berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja dengan pendapatan yang layak untuk meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Diharapkan pemerintah Provinsi Papua dapat mempertahankan pertumbuhan IPM yang sedang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat dicapai dengan memperbanyak dan meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jalan yang aksesibel, serta penunjang lainnya untuk meningkatkan taraf hidup penduduk dan produktivitas mereka. Pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan dana otonomi khususnya untuk membangun wilayah dan penduduknya. Masyarakat juga diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dirinya dengan berpartisipasi pada setiap program yang dilaksanakan pemerintah.